



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHTADIN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 453187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.674.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/40 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 1.051.000.000		
2. Tanah Seluas 939 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 961.000.000		
3. Tanah Seluas 4.100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 501.000.000		
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 161.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	106.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.820.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.462.519
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.825.282.519
III. HUTANG	Rp.	4.696.504
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.820.586.015

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnpkp.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnpkp.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.